

Analisis Pembiayaan Sektor Kesehatan Bersumber Pemerintah di Kota Banda Aceh tahun Anggaran 2006-2007

Nurailhan

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=65044&lokasi=lokal>

Abstrak

Jumlah keseluruhan dana kesehatan yang ada di Kota Banda Aceh pasca Tsunami 2004 sang/ at banyak dan terus mengalami peningkatan dari tahun 2005 s/d 2007 terutama yang berasal dari Pemerintah. Pada kenyataannya dana tersebut belum merata pendistribusiannya dalam mencakup keseluruhan program. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Tahunan Dinkes Kota Banda Aceh tahun 2005 s/d 2007, dimana jumlah kasus penyakit menular masih tinggi padahal dari Laporan Realisasi Anggaran ternyata masih ada dana yang belum habis dismp. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran pendanaan kesehatan melalui institusi kesehatan di Kota Banda Aceh, berdasarkan sumber pendanaan, pengelola dana, penyedia pelayanan, fungsi pelayanan, mata anggaran dan penerima manfaat dari tiap kegiatan kesehatan untuk tahun anggaran 2006-2007. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh meliputi Dinas Kesehatan dan RSUD Meuraxa, yang kesemuanya bersumber dari sektor publik. Pengumpulan data dilakukan dengan kajian dokumen dan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasil studi ini menunjukkan bahwa jumlah pendanaan total sektor kesehatan cenderung meningkat dan jumlah pendanaan perkapita di Kota Banda Aceh telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Depkes RI, dan standar Bank Dunia (1993), tetapi belum mencukupi jika dilihat dari standar yang ditetapkan oleh WHO. Walaupun jumlah dana yang direalisasikan di sektor kesehatan cenderung meningkat, tetapi dalam penggunaan dana di tiap kegiatan kesehatan masih kurang tepat sasaran. Dimana dana yang ada, ternyata dalam penggunaannya lebih besar digunakan untuk membayar gaji dan honor petugas serta untuk keperluan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Di dalam tiap kegiatan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh tiap subdin, belum terkoordinasi dengan baik karena tidak adanya program prioritas yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan di tingkat dinkes dan RS, sehingga terkesan tiap kegiatan yang dilaksanakan kurang terkoordinasi dan kurang sampai ke masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah Kota, Bappeda dan DPRD Kota Banda Aceh, dalam menetapkan kebijakan alokasi anggaran supaya berdasarkan atas sektor-sektor prioritas daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM, sehingga sektor kesehatan yang menjadi salah satu sektor prioritas daerah mendapatkan proporsi pendanaan yang memadai. Dan kepada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Meuraxa Kota Banda Aceh agar dalam melakukan penyusunan pengalokasian dana kesehatan, lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan kesehatan yang memberi banyak manfaat kepada masyarakat.

The total health financing in Banda Aceh City after Tsunami in 2004 was abundant and getting increase from 2005 to 2007, mostly from government. In fact, the fund was still not evenly distributed to cover all of programs. Banda Aceh City Health District Annual Report's 2005-2007 showed that communicable disease cases were still high although in Budget Realization Report was a rest of the fund that has not been spent yet. The research was aimed to describe health financing through health institution in Banda Aceh City, based on financing sources, financing agent, provider, function, line item budgeting and beneficiaries from every health -programs in 2006-2007 budget years. The research was conducted in Health District office and Meuraxa Public Hospital Banda Aceh City, whose the main resource

were from public sector and employed basic realization of allocation. Data were collected by documentation study and depth interview with selected informant. The result showed 1. that the number of health sector financing tend to increase and _ the number of per capita financing in Banda Aceh City has met the standar determined by Health Department R.I. and the standar of World Bank (1993), but hasn't met standar determined by WHO. However, even though realization of the financing tend to increase in health sector, fund utilization in every health program was still not addressed its target. The vast majority of available time was spent on the officer wage and incentive and office equipments. Health development conducted by every sub office was still not well coordinated due to there no priority of the program determined by policy maker in every health department and hospital hierarchy, so that it seemed as though every program in coordination and less to touch the society. It is suggested to City Government, the institution of development plan and parliament of Banda Aceh City in specifying policy of allocation health financing that based on to area preference sectors which has been specified in RPJM, so that health sector gets proportion of adequate financing. And to Public Health Service and Hospital Meuraxa Banda Aceh City in expectation of -doing compilation of allocation health financing, more majoring development activities of health giving many benefits to public.